

INTISARI

Kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi isu krusial yang tidak hanya menjadi isu marginal tetapi juga sebuah bukti epidemi sosial yang tersebar secara terstruktur dan sistematis di berbagai belahan dunia. Penelitian ini menganalisis bagaimana mekanisme *policy learning* dalam kebijakan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Yogyakarta, dengan fokus pada bagaimana *policy learning* berkontribusi terhadap perubahan kebijakan dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2013 menjadi Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang bertujuan memahami secara mendalam dinamika pembelajaran kebijakan dalam konteks lokal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan telaah dokumen kebijakan, dengan melibatkan aktor dari lembaga pemerintah, unit layanan, *Non Governmental Organization* (NGO), penegak hukum, dan jejaring masyarakat sipil. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) dengan penekanan pada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan utama penelitian mengidentifikasi bahwa *policy learning* di Kota Yogyakarta dipicu oleh tiga faktor utama, yaitu: (1) Interaksi antar aktor lintas sektor yang intensif dan berkelanjutan, (2) Tekanan eksternal berupa peningkatan kasus, tuntutan masyarakat sipil, dan perubahan regulasi nasional, serta (3) Konteks sosial, politik, dan budaya yang khas, ditandai oleh kuatnya tradisi aktivisme perempuan, peran strategis organisasi masyarakat sipil, serta kepemimpinan simbolik dan substantif Kanjeng Ratu Hemas dalam isu perlindungan perempuan dan anak. Proses *policy learning* berlangsung melalui mekanisme evaluasi implementasi, umpan balik dari penanganan kasus, serta *lesson drawing* dari praktik lokal dan jejaring. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian *policy learning* dengan menegaskan pentingnya konteks lokal dan jaringan aktor dalam proses *policy learning*. Secara empiris, temuan penelitian memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah untuk membangun sistem *policy learning* yang lebih terstruktur, berbasis data, dan berorientasi pada perubahan sosial jangka panjang dalam kebijakan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kata Kunci : *Policy Learning, Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*

ABSTRACT

Violence against women and children has become a critical issue that is no longer merely marginal, but rather constitutes evidence of a social epidemic that is structured and systematic across various parts of the world. This study analyzes the mechanisms of policy learning in the implementation of policies for the protection against violence toward women and children in the City of Yogyakarta, with a particular focus on how policy learning contributed to policy change from Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2013 to Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2025. This research employs a qualitative approach with a case study design, aiming to develop an in-depth understanding of the dynamics of policy learning within a local context. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis, involving actors from government institutions, service delivery units, non-governmental organizations (NGOs), law enforcement agencies, and civil society networks. Data analysis was conducted using the interactive model developed by Miles, Huberman, and Saldaña (2014), emphasizing data reduction, data display, and conclusion drawing. The main findings indicate that policy learning in the City of Yogyakarta is driven by three key factors: (1) intensive and sustained cross-sectoral interaction among policy actors; (2) external pressures in the form of increasing case prevalence, demands from civil society, and changes in national regulations; and (3) a distinctive social, political, and cultural context, characterized by a strong tradition of women's activism, the strategic role of civil society organizations, and the symbolic as well as substantive leadership of Kanjeng Ratu Hemas in advancing the protection of women and children. The process of policy learning operates through mechanisms of implementation evaluation, feedback derived from case handling, and lesson drawing from local practices and policy networks. Theoretically, this study enriches the policy learning literature by reaffirming the importance of local context and actor networks in shaping policy learning processes. Empirically, the findings offer strategic recommendations for local governments to develop more structured, data-driven policy learning systems oriented toward long-term social change in policies for the protection against violence toward women and children.

Keywords: *Policy Learning; Violence against Women and Children*